



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



TAHUN

2025



@perkeretaapian



ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id



ditjenperkeretaapian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

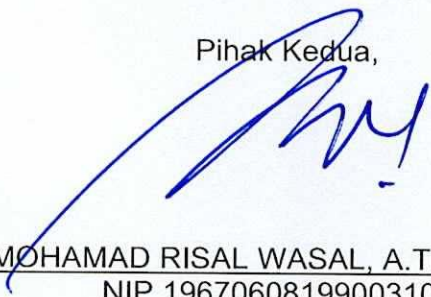
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T
NIP 196507031991032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029 serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T
NIP 196507031991032001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	1
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	3
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	6
	2.1. Tujuan dan Sasaran	6
	2.2. Arah Kebijakan dan Strategi	7
	2.3. Indikator Kinerja Kegiatan	7
	2.4. Program dan Kegiatan	15
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	16
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	16
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	18
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025	23
BAB 4	: PENUTUP	25

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025

LAMPIRAN B : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN C : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, capaian periode sebelumnya serta beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, target kinerja serta alokasi anggaran dan rencana aksi. Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan target pencapaian terhadap sasaran dari program dan kegiatan

berdasarkan kebijakan prioritas dan sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata

laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu dengan beberapa kelompok fungsional tertentu dan koordinator/ketua tim.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi Desember Tahun 2025 sebanyak 117 orang, dengan uraian komposisi sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

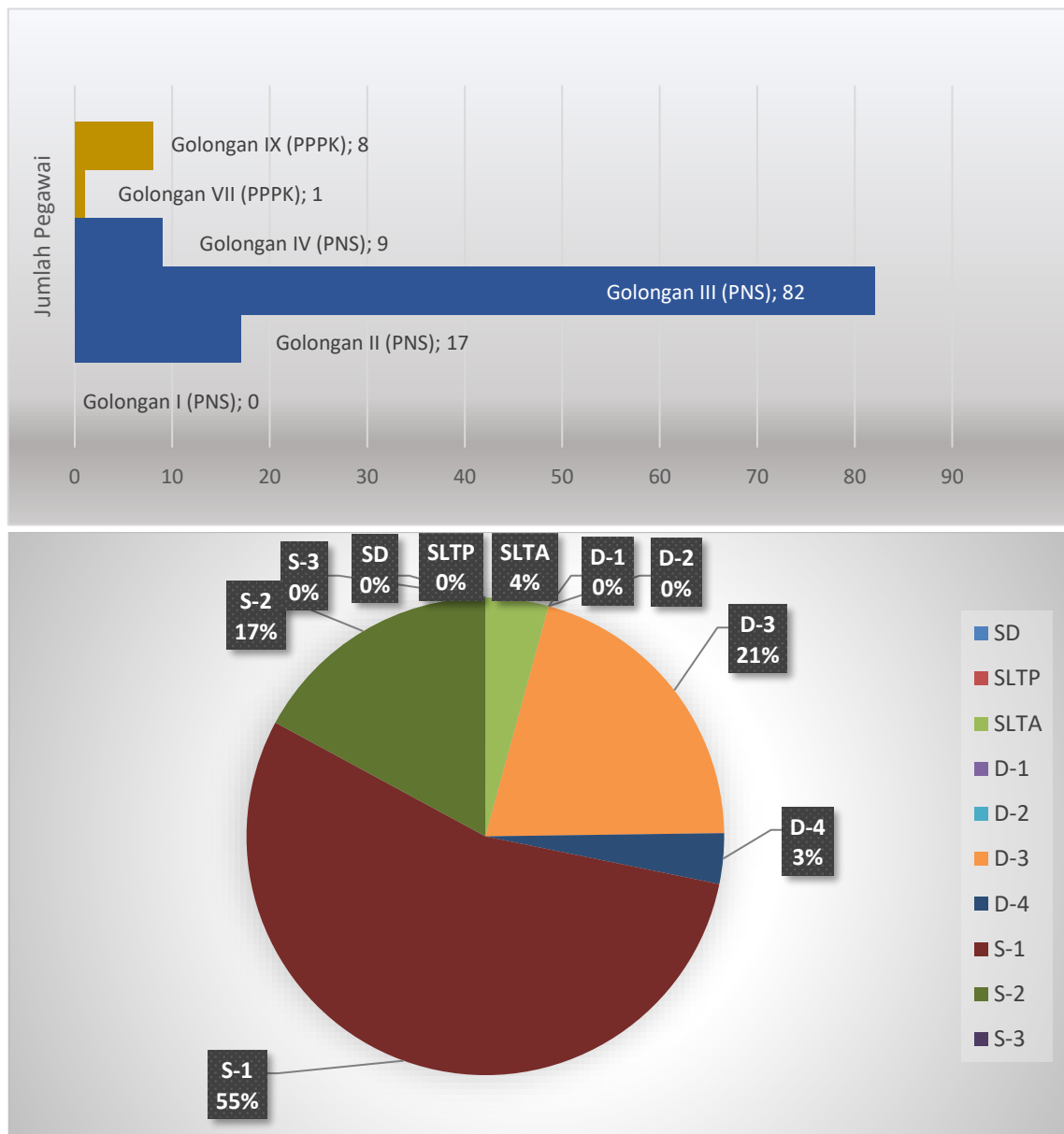
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	26
2	Bagian Keuangan	30
3	Bagian Hukum	24
4	Bagian SDM dan Umum	37
Jumlah		117

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	-
2	PNS Golongan II	17
3	PNS Golongan III	82
4	PNS Golongan IV	9
5	PPPK Golongan VIII	1
6	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		117

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	5
4	D-1	-
5	D-2	-
6	D-3	24
7	D-4	4
8	S-1	64
9	S-2	20
10	S-3	-
Jumlah		117



Gambar 1-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki misi sebagai berikut:

1. mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju; dan
2. mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai representasi dari visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hendak dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan dari 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut:

1. terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional (SN);
2. terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
3. terwujudnya kebijakan transportasi perkeretaapian yang berkualitas; dan
4. terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 termasuk *cascading* sasaran program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan mampu berperan sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun sasaran kegiatan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan:

1. terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
2. tersedianya SDM regulator perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
3. tersedianya teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal;
4. terwujudnya dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
5. terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan pengendalian yang memadai;
6. meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya anggaran dan aset pemerintah; dan
7. meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1. melakukan perbaikan tata laksana;
2. pemenuhan standar mutu dalam penyusunan kebijakan;
3. melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran; dan
5. melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi pada rancangan Rencana Strategis telah dikonseptkan Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tolok ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	b	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00	3,20	3,40	3,60	4,00
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	f	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	84,00	84,50	85,00	86,00
	g	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00
	h	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	i	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	j	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	k	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,19	3,20	3,25	3,30	3,35
Meningkatnya Kualitas Tata	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	89,20	90,00	91,00	92,00	93,00

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian		Setditjen Perkeretaapian						
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-2 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis $\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2025-2029}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Profesional ASN	Merupakan parameter untuk mengukur Profesional ASN	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	yang meliputi tingkat Pendidikan, kompetensi (Diklat/ seminar/ workshop/ sejenisnya), kinerja dan disiplin	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi 81 – 90: Kategori Tinggi 71 – 80: Kategori Sedang 61 – 70: Kategori Rendah 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah	mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) atau reliabilitas dari sebuah sistem teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu pada Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian sesuai hasil	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	yang ditemukan dalam audit internal			dukungan manajemen	
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa baik suatu lembaga	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian dihitung mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	mengelola aset-aset yang dimilikinya		mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolok ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dokumen rancangan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Rp. 193.421.222.000;
2. Tahun 2026: Rp. 193.262.466.000;
3. Tahun 2027: Rp. 203.269.714.000;
4. Tahun 2028: Rp. 213.402.869.000; dan
5. Tahun 2029: Rp. 224.271.979.000.

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada rancangan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 dan Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. Adapun tata cara pengukuran indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis $\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 $\frac{\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$
3	Indeks Profesional ASN	Nilai	Tata cara perhitungan dengan skala 0-100 mengacu pada Peraturan MENPANRB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN
4	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			pada Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
6	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (skala 0-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I.
7	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko dengan skala 0-30 kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan
8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.
9	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian dihitung mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan
10	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			(proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-100) diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan
12	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada rancangan Rencana Strategis, memperhatikan capaian periode sebelumnya dan perkembangan kebijakan, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025. Adapun target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20,000
	b	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,000
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,000

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,000
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	f	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,650
	g	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15,000
	h	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,000
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	i	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,000
	j	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,000
	k	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,190
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,200
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,890

Untuk uraian target pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2024	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Keterangan
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	108,890	20,000	20,000	- Baseline 2024 merupakan realisasi kumulatif periode 2020-2024 - Penyusunan/revisi/penyempurnaan peraturan perundangan bidang perkeretaapian pada Tahun 2025 ditargetkan penetapan sebanyak 5 peraturan
	b	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,000	100,000	100,000	Pada Tahun 2025 terdapat 4 kegiatan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan perkeretaapian
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c	Indeks Profesional ASN	Nilai	88,490	89,000	89,000	Komponen penilaian Indeks Profesional ASN meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	3,000	3,000	- Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024 - Indeks 3,00 dengan Predikat Baik
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,000	90,000	90,000	Penilaian mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2024	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Keterangan
							Target mempertimbangkan realisasi Tahun 2024
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	f	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,350	83,650	83,650	- Penilaian mencakup parameter perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja - Nilai 83,65 dengan Kategori A
	g	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	15,000	15,000	- Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024 - Nilai 15 dengan Kategori <i>Defined (Level 3)</i>
	h	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,610	81,000	81,000	Pada Tahun 2024 sebagai <i>baseline</i>, temuan auditor internal sebanyak 490 terdiri atas Tuntas sebanyak 395 (80,61%), Proses sebanyak 87 (17,76%), Belum Tindak Lanjut sebanyak 8 (1,63%)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	i	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	84,070	85,000	85,000	- Target NKA dihitung berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 - Nilai 85,00 dengan Kategori Baik
	j	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	Target PNBP sesuai DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp17.500.000.000,00
	k	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,180	3,190	3,190	Penilaian mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,160	89,200	89,200	Pelaksanaan penilaian oleh Setjen Kementerian Perhubungan cq. Biro Umum

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2024	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Keterangan
Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian							• Nilai 89,20 dengan Kategori Memuaskan (A)
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,880 (nilai sementara)	3,890	3,890	• Hasil survey kepuasan (skala 1-4) kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan internal terkait kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga/umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

Alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian) pada Tahun 2025 sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor SP DIPA-022.08-0/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp193.421.222.000,00. Adapun rincian anggaran berdasarkan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3-4 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	10.213.903.000
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	159.006.060.000
3.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	9.082.638.000
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.952.563.000
5.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.166.058.000
Jumlah		193.421.222.000

Tabel 3-5 Rincian Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	20,000	4.003.473.000
	b	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	100,000	6.050.000.000
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c	Indeks Profesional ASN	89,000	11.685.776.000
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	3,000	9.082.638.000
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,000	12.952.563.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang	f	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	83,650	13.221.160.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	g	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	15,000	2.893.665.000
	h	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	81,000	365.992.000
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	i	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	85,000	6.381.680.000
	j	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	100,000	
	k	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	3,190	6.750.587.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,200	1.043.112.000
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,890	118.990.576.000
Jumlah				193.421.222.000

BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 meliputi Program Dukungan Manajemen sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menetapkan target masing-masing indikator kinerja kegiatan dan selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%
		Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNGRUM, M.T.
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian	%	20,000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,000
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,000
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,000
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,000
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,650
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,000
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,000
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,000
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,000
		Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,190
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,200
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,890

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen

- a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp.	193.421.222.000
Rp.	10.213.903.000
Rp.	159.006.060.000
Rp.	9.082.638.000
Rp.	12.952.563.000
Rp.	2.166.058.000
Rp.	193.421.222.000

Jakarta, Januari 2025

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian													10.053.473.000	Kabag Hukum
IKK 1	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	0%	0%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	20%	4.003.473.000	Kabag Hukum
1)	Koordinsi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.236.872.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
2)	Koordinsi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	213.027.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	386.159.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	85%	92%	100%	100%	100%		
4)	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	330.000.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	82.500.000	165.000.000	280.500.000	280.500.000	297.000.000	330.000.000		
5)	Pengelolaan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.837.415.000	Kabag Hukum
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	918.707.500	918.707.500	1.561.802.750	1.561.802.750	1.653.673.500	1.837.415.000		
IKK 2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peminanan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	6.050.000.000	Kabag Perencanaan
1)	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	6.050.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	3.025.000.000	3.025.000.000	5.142.500.000	5.142.500.000	5.445.000.000	6.050.000.000		
SK 2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional													11.685.776.000	Kabag SDM dan Umum
IKK 3	Indeks Profesional ASN (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	11.685.776.000	Kabag SDM dan Umum
1)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	162.700.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
2)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	8.029.969.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	4.416.482.950	5.219.479.850	6.022.476.750	6.423.975.200	7.226.972.100	8.029.969.000		
3)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	14.010.700	24.544.199	30.568.800	39.484.700	47.126.900	70.053.500	82.790.500	95.527.500	101.896.000	114.633.000	127.370.000	127.370.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	11%	19%	24%	31%	37%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
4)	Character Building Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	3.365.737.000	Kabag SDM dan Umum
		0%	11%	19%	32%	50%	74%	1.851.155.350	2.187.729.050	2.524.302.750	2.892.589.600	3.029.163.300	3.365.737.000		
SK 3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal													9.082.638.000	Kabag Perencanaan
IKK 4	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9.082.638.000	Kabag Perencanaan
1)	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.723.109.000	Kabag Perencanaan
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	6.061.529.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	298.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	89.400.000	89.400.000	89.400.000	208.600.000	292.040.000	298.000.000		
SK 4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian													12.952.563.000	Kabag Hukum
IKK 5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	12.952.563.000	Kabag Hukum
1)	Pelayanan humas dan protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	12.952.563.000	Kabag Hukum
		0%	0%	4%	5%	5%	6%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai													16.480.817.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag Hukum Kabag SDM dan Umum
IKK 6	Nilai AKIP Setdijten Perkeretaapihan (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,65	83,65	83,65	13.221.160.000	Kabag Perencanaan
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.349.986.000	Kabag Perencanaan
		35.737.906	121.979.681	363.799.048	438.698.852	543.023.579	791.262.929	815.872.865	897.727.651	1.059.832.227	4.365.588.576	4.586.542.988	5.349.986.000		
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapihan serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.676.652.000	Kabag Perencanaan
		87.353.569	175.042.469	331.809.431	350.252.603	391.498.242	600.073.751	759.355.691	885.607.586	1.070.039.306	1.162.087.501	1.341.321.600	1.676.652.000		
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	836.719.000	Kabag Perencanaan
		102.581.749	102.581.749	102.581.749	126.846.600	179.057.866	214.032.720	472.997.251	472.997.251	657.661.134	691.966.613	691.966.613	836.719.000		
4)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapihan Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.363.456.000	Kabag Perencanaan
		136.345.600	272.691.200	409.036.800	545.382.400	681.728.000	818.073.600	954.419.200	1.090.764.800	1.227.110.400	1.363.456.000	1.363.456.000	1.363.456.000		
5)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.039.254.000	Kabag Perencanaan
		26.189.201	101.327.265	120.137.762	128.867.496	159.629.414	278.935.774	444.488.936	486.786.574	665.850.038	935.328.600	1.039.254.000	1.039.254.000		
6)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.720.302.000	Kabag Perencanaan
		43.207.200	43.207.200	43.207.200	150.870.700	150.870.700	280.247.700	860.151.000	1.032.181.200	1.204.211.400	1.376.241.600	1.548.271.800	1.720.302.000		
7)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapihan dan Rencana Induk Perkeretaapihan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.068.767.000	Kabag Perencanaan
		43.207.200	43.207.200	43.207.200	150.870.700	150.870.700	280.247.700	534.383.500	641.260.200	748.136.900	855.013.600	961.890.300	1.068.767.000		
8)	Penyediaan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	166.024.000	Kabag Perencanaan
		43.207.200	43.207.200	43.207.200	150.870.700	150.870.700	280.247.700	83.012.000	99.614.400	116.216.800	132.819.200	149.421.600	166.024.000		
IKK 7	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setdijten Perkeretaapihan (Level)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	2.893.665.000	Kabag Perencanaan
1)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapihan dan manajemen resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.893.665.000	Kabag Perencanaan
		15.150.000	72.150.000	289.366.500	289.366.500	289.366.500	289.366.500	868.099.500	1.157.466.000	1.446.832.500	1.736.199.000	2.314.932.000	2.893.665.000		
IKK 8	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal (%)	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	80,61%	81,00%	365.992.000	Kabag Keuangan
1)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	365.992.000	Kabag Keuangan
		0%	0%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
SK 6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah													13.132.267.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag Hukum Kabag SDM dan Umum
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Setdijten Perkeretaapihan (Nilai)	0%	0%	9%	17%	26%	36%	45%	55%	64%	74%	83%	85%	6.381.680.000	Kabag Keuangan
1)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	709.178.000	Kabag Keuangan
		70.917.800	141.835.600	212.753.400	283.671.200	319.130.100	354.589.000	390.047.900	425.506.800	496.424.600	567.342.400	638.260.200	709.178.000		
2)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.351.237.000	Kabag Keuangan
		135.123.700	675.618.500	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000		
3)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawain dan Keumahahtagaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	372.199.000	Kabag SDM dan Umum
		37.219.900	74.439.800	111.659.700	148.879.600	167.489.550	186.099.500	204.709.450	223.319.400	260.539.300	297.759.200	334.979.100	372.199.000		
4)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	877.620.000	Kabag Keuangan
		131.643.000	207.118.320	305.236.236	450.219.060	555.094.650	579.229.200	614.334.000	658.215.000	702.096.000	789.858.000	877.620.000	877.620.000		
5)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.168.303.000	Kabag Perencanaan
		6.892.988	61.452.738	117.998.603	137.742.924	642.566.650	759.396.950	876.227.250	934.642.400	1.051.472.700	1.168.303.000	1.168.303.000	1.168.303.000		
6)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	854.985.000	Kabag Hukum
		128.247.750	201.776.460	297.363.783	438.607.305	540.778.013	564.290.100	598.489.500	641.238.750	683.988.000	769.486.500	854.985.000	854.985.000		
7)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	628.504.000	Kabag Keuangan
		3.708.174	33.059.310	63.478.904	74.100.622	345.677.200	408.527.600	471.378.000	502.803.200	565.653.600	628.504.000	628.504.000	628.504.000		
8)	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	419.654.000	Kabag Keuangan
		2.475.959	22.073.800	42.385.054	49.477.207	230.809.700	272.775.100	314.740.500	335.723.200	377.688.600	419.654.000	419.654.000	419.654.000		
IKK 10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdijten Perkeretaapihan (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	345.810.000	
1)	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	273.138.000	Kabag Hukum
		21.851.040	43.702.080	65.553.120	87.404.160	109.255.200	131.106.240	152.957.280	174.808.320	196.659.360	218.510.400	240.361.440	273.138.000		
2)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	72.672.000	Kabag Keuangan
		5.813.760	11.627.520	17.441.280	23.255.040	29.068.800	34.882.560	40.696.320	46.510.080	52.323.840	58.137.600	63.951.360	72.672.000		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN AWAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
IKK 11	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18	6.404.777.000	Kabag Keuangan	
1	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	252.429.000	Kabag Keuangan
		2.524.290	5.048.580	7.572.870	10.097.160	12.621.450	15.145.740	100.971.600	126.214.500	151.457.400	176.700.300	201.943.200	252.429.000			
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%			
2	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	184.399.000	Kabag Keuangan
		14.751.920	29.503.840	44.255.760	59.007.680	73.759.600	88.511.520	103.263.440	118.015.360	132.767.280	147.519.200	162.271.120	184.399.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
3	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.526.244.000	Kabag Keuangan
		442.099.520	884.199.040	1.326.298.560	1.768.398.080	2.210.497.600	2.652.597.120	3.094.696.640	3.536.796.160	3.978.895.680	4.420.995.200	4.863.094.720	5.526.244.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
4	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	441.705.000	Kabag Keuangan
		35.336.400	70.672.800	106.009.200	141.345.600	176.682.000	212.018.400	247.354.800	282.691.200	318.027.600	353.364.000	388.700.400	441.705.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian													120.033.688.000	Kabag Perencanaan Kabag Keuangan Kabag Hukum Kabag SDM dan Umum	
IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,30	1.043.112.000	Kabag SDM dan Umum	
1	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	360.629.000	Kabag SDM dan Umum
		28.850.320	57.700.640	86.550.960	115.401.280	144.251.600	173.101.920	201.952.240	230.802.560	259.652.880	288.503.200	317.353.520	360.629.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
2	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	332.418.000	Kabag SDM dan Umum
		26.593.440	53.186.880	79.780.320	106.373.760	132.967.200	159.560.640	186.154.080	212.747.520	239.340.960	265.934.400	292.527.840	332.418.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
3	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	350.065.000	Kabag SDM dan Umum
		28.005.200	56.010.400	84.015.600	112.020.800	140.026.000	168.031.200	196.036.400	224.041.600	252.046.800	280.052.000	308.057.200	350.065.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
IKK 13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	118.990.576.000	Kabag SDM dan Umum	
1	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	482.901.000	Kabag SDM dan Umum
		38.632.080	77.264.160	115.896.240	154.528.320	193.160.400	231.792.480	270.424.560	309.056.640	347.688.720	386.320.800	424.952.880	482.901.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
2	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	908.790.000	Kabag SDM dan Umum
		72.703.200	145.406.400	218.109.600	290.812.800	363.516.000	436.219.200	508.922.400	581.625.600	654.328.800	727.032.000	799.735.200	908.790.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
3	Monitoring Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	295.056.000	Kabag SDM dan Umum
		23.604.480	47.208.960	70.813.440	94.417.920	118.022.400	141.626.880	165.231.360	188.835.840	212.440.320	236.044.800	259.649.280	295.056.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
4	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	182.871.000	Kabag SDM dan Umum
		14.629.680	29.259.360	43.889.040	58.518.720	73.148.400	87.778.080	102.407.760	117.037.440	131.667.120	146.296.800	160.926.480	182.871.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
5	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	239.989.000	Kabag SDM dan Umum
		19.199.120	38.398.240	57.597.360	76.796.480	95.995.600	115.194.720	134.393.840	153.592.960	172.792.080	191.991.200	211.190.320	239.989.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
6	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahainggaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	446.415.000	Kabag SDM dan Umum
		35.713.200	71.426.400	107.139.600	142.852.800	178.566.000	214.279.200	249.992.400	285.705.600	321.418.800	357.132.000	392.845.200	446.415.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
7	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	378.381.000	Kabag SDM dan Umum
		30.270.480	60.540.960	90.811.440	121.081.920	151.352.400	181.622.880	211.893.360	242.163.840	272.434.320	302.704.800	332.975.280	378.381.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
8	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	575.377.000	Kabag SDM dan Umum
		46.030.160	92.060.320	138.090.480	184.120.640	230.150.800	276.180.960	322.211.120	368.241.280	414.271.440	460.301.600	506.331.760	575.377.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
9	Renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.809.279.000	Kabag SDM dan Umum
		464.742.320	929.484.640	1.394.226.960	1.858.969.280	2.323.711.600	2.788.453.920	3.253.196.240	3.717.938.560	4.182.680.880	4.647.423.200	5.112.165.520	5.809.279.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
10	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	69.754.600.000	Kabag SDM dan Umum
		5.580.368.000	11.160.736.000	16.741.104.000	22.321.472.000	27.901.840.000	33.482.208.000	39.062.576.000	44.642.944.000	50.223.312.000	55.803.680.000	61.384.048.000	69.754.600.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
11	Bimbingan Teknis Kerumahainggaan dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	425.507.000	Kabag SDM dan Umum
		34.040.560	68.081.120	102.121.680	136.162.240	170.202.800	204.243.360	238.283.920	272.324.480	306.365.040	340.405.600	374.446.160	425.507.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
12	Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Unit	9.310.274.000	Kabag SDM dan Umum
		744.821.920	1.489.643.840	2.234.465.760	2.979.287.680	3.724.109.600	4.468.931.520	5.213.753.440	5.958.575.360	6.703.397.280	7.448.219.200	8.193.041.120	9.310.274.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
13	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	851.925.000	Kabag SDM dan Umum
		68.154.000	136.308.000	204.462.000	272.616.000	340.770.000	408.924.000	477.078.000	545.232.000	613.386.000	681.540.000	749.694.000	851.925.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
14	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	29.329.211.000	Kabag SDM dan Umum
		2.346.336.880	4.692.673.760	7.039.010.640	9.385.347.520	11.731.684.400	14.078.021.280	16.424.358.160	18.770.695.040	21.117.031.920	23.463.368.800	25.809.705.680	29.329.211.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
														193.421.222.000		

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196507031991032001